

## ANALISIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA KABUPATEN PARIGI MOUTONG

AKHMAD \*)

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Kabupaten Parigi Moutong. Efektifitas pengelolaan dana alokasi umum menunjukkan persentase cukup efektif, hal ini nampak dari perbandingan antara target dan realisasi sama dengan satu atau persentase yang dihasilkan sebesar 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan dana tersebut efektif. Efisiensi pengelolaan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Parigi Moutong tahun 2009 sebesar 10.6% dengan kategori tidak efisien. Tahun 2010 besarnya efisiensi sebesar 97.9% dengan kategori tidak efisien. Tahun 2011 besarnya efisiensi belanja daerah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Parigi Moutong sebesar 90%. Besarnya kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan daerah pada Kabupaten Parigi Moutong selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan, tahun 2009 besarnya kontribusi sebesar 73%, tahun 2010 mengalami penurunan 69% dan tahun 2011 besarnya kontribusi sebesar 66%, yang artinya menunjukkan ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Daerah

### PENDAHULUAN

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius (pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda.

Di satu pihak otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, yang sekarang telah diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal, tidak lagi terkonsentrasi di pusat. Namun dipihak lain, otonomi daerah menghadirkan kekhawatiran munculnya "desentralisasi masalah" dan "desentralisasi kemiskinan". Artinya pelimpahan

masalah dan kemiskinan yang selama ini tidak mampu ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah pusat. Kewajiban pemerintah pusat dalam negara kesatuan untuk menjamin sumber keuangan untuk membiayai otonomi tersebut. Untuk menjamin sumber keuangan bagi daerah otonom, pemerintah harus menjamin perimbangan keuangan pusat dengan daerah.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan - kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan memengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan yaitu : Bagaimana pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Kabupaten Parigi Moutong?

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Dana Alokasi Umum dan

Dana Alokasi Khusus Pada Kabupaten Parigi Moutong

### Pengertian Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Daerah

Pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari satu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa pengukuran dalam rasio keuangan. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Hal ini juga disampaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dikhususkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kausal. Menurut Travers (dalam Umar, 2001:22) metode deskriptif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Penelitian kausal adalah penelitian untuk menguji hubungan kausalitas antara variabel yang dihipotesiskan sebagaimana dalam penelitian ini yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Parigi Moutong.

Penelitian ini dilakukan pada kantor Pemerintah Daerah yaitu Kas Daerah Kabupaten Parigi Moutong dan pada kantor Pemerintah Daerah lain yang berkaitan dengan penelitian ini

Definisi operasional dalam penelitian ini perlu dikemukakan untuk menghindari kesalahpahaman antara penulis dan pembaca dalam menafsirkan istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Berikut definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55/2005). Adanya dana transfer DAU dari pemerintah pusat maka daerah bisa fokus untuk menggunakan PAD untuk membiayai belanja modal yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini mengidentifikasi bahwa terdapat hubungan antara pemberian DAU dengan alokasi belanja modal.
- b. Dana Alokasi Khusus Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.
- c. Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencari tingkat efektifitas dapat digunakan rumus sebagai berikut :
 
$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Output Target}} \geq 1$$
 ➤ Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektifitas.

- Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 (satu), maka efektifitas tidak tercapai.
- d. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Suatu organisasi apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*). Efisiensi dalam penelitian ini adalah perbandingan antara belanja daerah yang dilakukan dibandingkan dengan penerimaan daerah yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencari tingkat efektifitas dapat digunakan rumus sebagai berikut :
 
$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Belanja}}{\text{Pendapatan}} \leq 1$$
  - Jika output belanja berbanding output pendapatan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efisiensi.
  - Jika output belanja berbanding output pendapatan kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun perkembangan dana alokasi umum selama tiga tahun terakhir pada Kabupaten Parigi Moutong yaitu sebagai berikut:

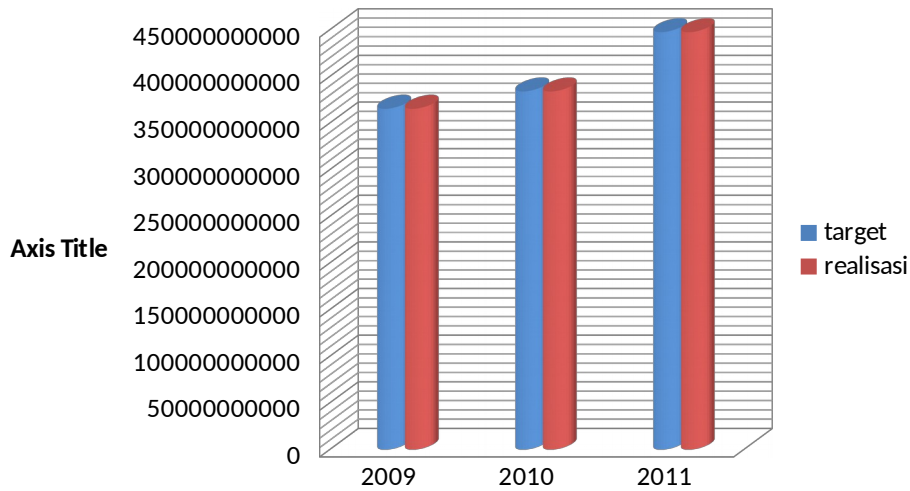
Tabel di bawah adalah hasil perkembangan dana alokasi umum selama tiga tahun terakhir pada Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan perkembangan secara signifikan. Tahun 2009 target penerimaan dana alokasi umum sebesar Rp. 365.480.000.000,- dan realisasi penerimaan dana alokasi umum sebesar Rp. 365.471.657.000,- dengan persentase sebesar 97.28%. Tahun 2010 target penerimaan dana alokasi umum sebesar Rp. 384.004.987.000,- dan realisasi penerimaan dana alokasi umum sebesar Rp. 384.004.987.000,- sehingga persentase yang dihasilkan sebesar 100%. Tahun 2011 target penerimaan dana alokasi umum sebesar Rp. 447.590.708.000,- dan realisasi yang terjadi sebesar Rp. 447.590.708.000,- sehingga persentase sebesar 100%.

Adapun perkembangan dana alokasi khusus pada Kabupaten Parigi Moutong selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

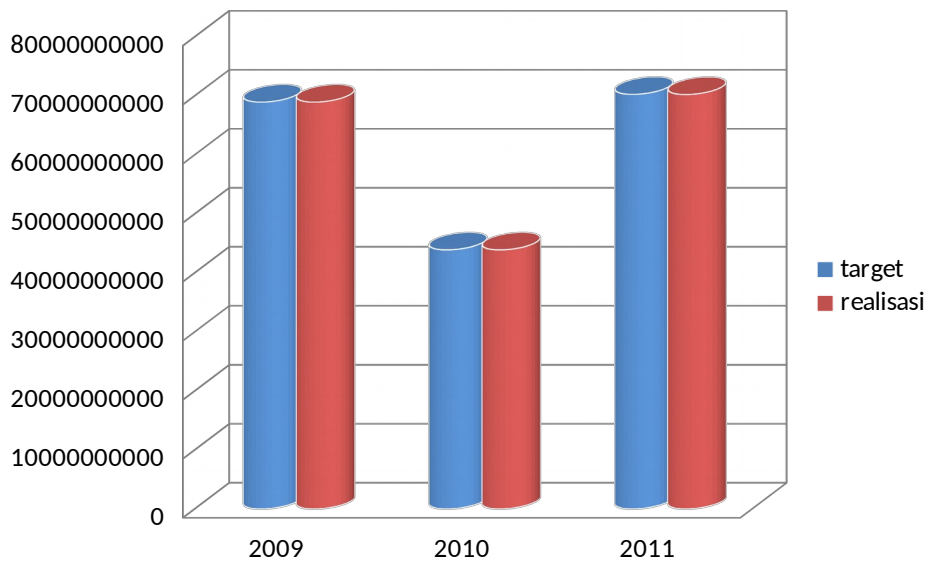
Tabel di bawah adalah penerimaan dana alokasi khusus Kabupaten Parigi Moutong selama tiga tahun terakhir. Tahun 2009 target penerimaan dana alokasi khusus sebesar Rp. 68.958.000.000,- dan realisasi yang terjadi sebesar Rp. 68.958.000.000,- sehingga persentase yang didapatkan sebesar 100%. Tahun 2010 perkembangan target dana alokasi khusus mengalami penurunan

besarnya target sebesar Rp. 43.905.600.000,- dan realisasi yang terjadi sebesar Rp. 43.905.600.000,- sehingga persentase yang ditunjukkan sebesar 100% dan tahun 2011 dana alokasi umum meningkat, besarnya target sebesar Rp. 70.267.900.000,- dan besarnya realisasi sebesar Rp. 70.237.300.000 sehingga besarnya persentase yang terjadi sebesar 99.96%.

Adapun perkembangan dana alokasi umum dan khusus selama tiga tahun terakhir pada Kabupaten Parigi Moutong yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.1  
Perkembangan Dana Alokasi Umum Selama Tiga Tahun Terakhir Pada Kabupaten Parigi Moutong



Gambar 4.2  
Perkembangan Dana Alokasi Khusus Selama Tiga Tahun Terakhir Pada Kabupaten Parigi Moutong

Sumber; data diolah

Umu  
berik

Tabel 4.3  
Perkembangan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus  
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 s/d 2011

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
<b>Dana Alokasi Umum</b>				
1	2009	365.480.000.000	365.471.657.000	100%
2	2010	384.004.987.000	384.004.987.000	100%
3	2011	447.590.708.000	447.590.706.000	100%
<b>Dana Alokasi Khusus</b>				
1	2009	68.958.000.000	68.958.000.000	100%
2	2010	43.905.600.000	43.905.600.000	100%
3	2011	70.267.900.000	70.237.300.000	99.96%

Tabel 4.4  
Perbandingan Antara Penerimaan Pendapatan Daerah dan  
Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009- 2011

No	Tahun	Belanja Daerah	Pendapatan Daerah	Persentase (%)
	2009	526.287.942.683	495.594.692.436	10.6 %
	2010	540,208,141,054	551,661,598,442	97.9 %
	2011	605,599,847,228	672,556,547,919	90 %

Tabel 4.5  
Kontribusi Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Daerah  
Kabupaten Parigi Moutong  
Tahun 2009 – 2011

No	Tahun	Dana Alokasi Umum	Pendapatan Daerah	Kontribusi (%)
1	2009	365.471.657.000	495.594.692.436	73 %
2	2010	384.004.987.000	551.539.822.039	69 %
3	2011	447.590.706.000	672.556.547.919	66 %

Tabel 4.6  
Kontribusi Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah  
Kabupaten Parigi Moutong  
Tahun 2009 – 2011

No	Tahun	Dana Alokasi Khusus	Pendapatan Daerah	Kontribusi (%)
1	2009	68.958.000.000	495.594.692.436	13 %
2	2010	43.905.600.000	551.539.822.039	0.7 %
3	2011	70.237.300.000	672.556.547.919	10 %

Tabel 4.3 adalah tabel perkembangan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten Parigi Moutong selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan secara signifikan, hal ini ditunjukkan dari perolehan persentase yang didapatkan dimana diperoleh dari target penerimaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang terjadi.

Tabel 4.4 uraian antara pendapatan dan pengeluaran (belanja) yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong selama tiga tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil perhitungan antara belanja daerah dan pendapatan daerah diperoleh hasil yaitu sebagai berikut:

- Tahun 2009 menunjukkan bahwa belanja lebih besar dilakukan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh Kabupaten Parigi Moutong, hal ini menunjukkan tidak efisien penggunaan dana yang dilakukan atau terjadi defisit pada laporan keuangan tersebut sehingga terjadi kerugian pada tahun tersebut.
- Tahun 2010 menunjukkan bahwa belanja daerah lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun tersebut terjadi efisien penggunaan dana, sehingga tahun tersebut terjadi investasi di dalamnya.
- Tahun 2011 menunjukkan hal yang sama dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja, hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ketahun Kabupaten Parigi Moutong sudah mampu mengelola pendapatan daerah yang ditunjukkan selama dua tahun terakhir.

Tabel 4.5 Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa besarnya kontribusi dana alokasi umum terhadap pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang diterima pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di daerah sendiri. Besarnya kontribusi yang terjadi selama tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan, tahun 2009 besarnya kontribusi sebesar 73 %, tahun 2010 menurun besarnya kontribusi

sebesar 69 % dan tahun 2011 menurun sebesar 66 %, hal ini menunjukkan bahwa selama tiga tahun Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan tingkat kemandirian mengalami kemajuan dan menunjukkan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mulai dikurangi sehingga ini berdampak baik pada daerah tersebut.

Tabel 4.6 hasil perhitungan kontribusi dana alokasi khusus terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi dana alokasi khusus menunjukkan selama tiga tahun terjadi fluktuatif. Tahun 2009 besarnya kontribusi sebesar 13%, kemudian tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 0.7% dan tahun 2011 mengalami peningkatan hingga 10%, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana yang dilakukan oleh kabupaten tersebut mengalami kekurangan dikarenakan salah satunya adalah selama tiga tahun terakhir pembangunan rumah sakit ditadatkan yang dilakukan pemerintah hanyalah melakukan renovasi atas rumah sakit beserta puskesmas yang berada di Kabupaten Parigi Moutong.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan berdasarkan data empiris yang didapatkan dilapangan yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan penerimaan dana alokasi umum selama tiga tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal dibuktikan dari target dan realisasi yang terjadi selama ini. Tahun 2009 besarnya persentase diterima sebesar 97.28%, tahun 2010 dan 2011 mengalami peningkatan dengan nilai persentase sebesar 100%.
2. Pengelolaan penerimaan dana alokasi khusus selama tiga tahun menunjukkan fluktuatif dimana tahun 2009 besarnya realisasi sebesar Rp. 68.958.000.000,- dengan persentase sebesar 100%, tahun 2010 mengalami penurunan penerimaan besarnya realisasi sebesar Rp. 43.905.600.000,- dengan persentase sebesar 100% dan tahun 2011 besarnya penerimaan sebesar 70.237.300.000,- dan besarnya persentase sebesar 99.96%.
3. Efektifitas pengelolaan dana alokasi umum menunjukkan persentase cukup efektif, hal ini nampak dari perbandingan antara target dan realisasi sama dengan satu atau persentase yang dihasilkan sebesar 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan dana tersebut efektif.
4. Efisiensi pengelolaan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Parigi Moutong tahun 2009 sebesar

- 10.6% dengan kategori tidak efisien. Tahun 2010 besarnya efisiensi sebesar 97.9% dengan kategori tidak efisiensi. Tahun 2011 besarnya efisiensi belanja daerah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Parigi Moutong sebesar 90%.
5. Besarnya kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan daerah pada Kabupaten Parigi Moutong selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan, tahun 2009 besarnya kontribusi sebesar 73%, tahun 2010 mengalami penurunan 69% dan tahun 2011 besarnya kontribusi sebesar 66%, yang artinya menunjukkan ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang.
  6. Besarnya kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Daerah selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuatif. Tahun 2009 besarnya kontribusi sebesar 13%, tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 0.7% dan tahun 2011 besarnya kontribusi sebesar 10%.

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah melalui SKPD penghasil PAD, sebaiknya melakukan inventarisasi kembali mengenai objek pajak dan sumber pajak baru serta retribusi daerah yang memiliki potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah agar dengan pendapatan tersebut ketergantungan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Parigi Moutong dapat dikurangi dengan pemerintah pusat.
2. Pemerintah kabupaten Parigi Moutong hendaknya mengurangi tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat agar dapat dikatakan daerah mandiri dan pelaksanaan otonomi daerah tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur hak-hak setiap daerah atau kabupaten tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Basry, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Bratakusuma, Sholikin. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Editorial Media Indonesia. *Menggenjot Belanja Modal*. 25 Agustus 2008.

Ghozali, Imam. 2006. *Statistik Multivariat SPSS*. Penerbit BP Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai)*. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

\_\_\_\_\_. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat.

Hamzah, 2007. "Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran". Simposium Akuntansi & Keuangan Sektor Publik Pertama Pasca Sarjana UPN Veteran. Surabaya.

Hari Adi, Priyo. 2006. "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah". Simposium Nasional Akuntansi IX.

Indriantoro, Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.

Keefer, Philip & Stuti Khemani. 2003. *The Political Economy of Public Expenditures*. Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People. The World Bank.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sukirno, Sadono. 1991. *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Kebijakan*. Penerbit FE2UI dan Bina Grafika. Jakarta.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang  
Perimbangan Keuangan Daerah  
[www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id)

\* Penulis adalah Staf Pengajar pada Fakultas  
Ekonomi Universitas Alkhairaat Palu